

---

## PEMAHAMAN DAN PRAKTIK KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA DI ERA DIGITAL

### *UNDERSTANDING AND PRACTICE OF INDONESIA POLITICAL COMMUNICATION IN DIGITAL ERA*

**Djoko Waluyo**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik,  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta 10110 Indonesia  
Email: djok016@kominfo.go.id

Naskah diterima: 25 November 2019, direvisi: 1 Desember 2019, disetujui: 09 Desember 2019

**Abstrak** – Artikel pemahaman dan praktik komunikasi politik Indonesia di era digital bertujuan untuk menjelaskan dan memberi pemikiran – pemikiran baru terhadap perkembangan konsep dan praktik komunikasi politik pada era digital. Bagaimana fungsi dan proses komunikasi politik dalam era digital, sehingga untuk mencapai kepada publik yang lebih luas telah dimanfaatkan jaringan Internet termasuk media sosial yang sudah dikenal dalam masyarakat luas. Metode penulisan menggunakan studi literatur dengan teknik analisis kualitatif – deskriptif. Temuan pemikiran, pemahaman dan praktik komunikasi politik di Indonesia pada era digital menjadi fenomena baru yang belum muncul pada era sebelumnya. Pemanfaatan internet dapat membantu praktik komunikasi politik yang lebih luas jangkauannya, tepat, cepat sasarannya. Diharapkan artikel ini dapat memberi wawasan yang lebih luas dengan pemahaman baru terhadap perkembangan konsep dan praktik komunikasi politik pada era digital.

**Kata Kunci :** Komunikasi Politik, Media Sosial, Era Digital

*Abstract* – *Articles of understanding and practice of Indonesian political communication in the digital era to explain and give new thoughts about the development of concepts and practices of political communication in the digital era. How is the function and process of political communication in the digital era, so as to reach the wider public the Internet has been utilized, including social media which is well known in the wider community. The writing method uses literature studies with qualitative - descriptive analysis techniques. The findings of thought, understanding and practice of political communication in Indonesia in the digital era became a new phenomenon that had not yet appeared in the previous era. Utilization of the internet can help the practice of political communication that is wider and more precise, quick to target. It is hoped that this article can provide broader insights with new understanding of the development of concepts and practices of political communication in the digital age.*

*Keywords: Political Communication, Social Media, Digital Era*

#### **PENDAHULUAN**

Kajian komunikasi politik dewasa ini makin menarik perhatian orang dan mulai banyak dilakukan para ahli komunikasi maupun pakar ilmu politik di tanah air. Demikian pula terhadap praktik komunikasi politik yang diberitakan dalam media massa dan media baru (internet), seperti surat kabar dan majalah berita mingguan, maupun media *online* menarik untuk

diikuti. Apalagi menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif nasional dan daerah 2019. Dengan tajuk “*Pemilu Serentak 2019*”. Berbagai ulasan dan hasil survei mengenai masalah-masalah politik nasional dari perspektif komunikasi politik banyak dilakukan media dan juga pakar. Ulasan tersebut diantaranya dapat menjadi porsi fungsi pendidikan politik.

Pertumbuhan politik nasional yang terus menuju pada kedewasaan berpolitik demokratis, yang dewasa ini ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan memanfaatkan internet dan media baru, maka praktik komunikasi politik lebih banyak dilakukan melalui media *online*. Namun demikian, konsep – konsep dan pemikiran teoritik yang menjadi landasan berpikir para politisi dan tokoh – tokoh nasional, masih berlandaskan pada konsep dan pemikiran baku dari literatur ilmu politik dan ilmu komunikasi. Pemanfaatan media internet dalam komunikasi politik menjadi fenomena baru yang menjadi menarik untuk sebuah kajian terkini.

Memasuki era reformasi, fenomena pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di tanah air sedang berproses ke arah yang positif, telah menempatkan prinsip – prinsip Negara demokrasi dengan lebih kuat. Prinsip – prinsip itu adalah kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia.

Dalam konsep kekuasaan , pilar – pilar Negara demokrasi ditegakkan melalui peran dan fungsi-fungsi dari *legislatif, eksekutif, dan yudikatif*. Serta sebagai suatu konvensi politik, pilar keempat juga turut ditegakkan yaitu peran media massa yang bebas dan merdeka. Bangunan demokrasi yang dibentuk dalam sistem politik yang dijalankan dan dipersambungkan melalui proses komunikasi politik antara supra struktur politik dan infra struktur politik.

Gabriel Almond menjelaskan, struktur politik dibedakan atas *infra struktur politik* (masyarakat/rakyat/publik, suasana kehidupan politik masyarakat/rakyat/publik, sektor politik: masyarakat/rakyat/publik); dan *supra struktur politik* (struktur politik pemerintahan, sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, sektor politik: pemerintahan) (Kantaprawira, 1977:54).

Kedua macam struktur politik itu disambungkan dengan komunikasi politik yang menjadi esensi penting untuk fungsi dan perannya lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun media massa. Menurut Almond, *komunikasi politik* merupakan salah satu dari empat fungsi input sistem politik. Tiga fungsi input lainnya adalah sosialisasi politik dan *recruitment*; artikulasi kepentingan atau perumusan kepentingan; dan agregasi kepentingan atau penggabungan kepentingan.

Dalam pendekatan komunikasi politik terhadap sistem politik, telah menjadikan komunikasi politik

sebagai penyebab bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik (Alfian,1993:1). Komunikasi politik diibaratkan sebagai sirkulasi darah dalam tubuh, bukan darahnya, tapi apa yang terkandung di dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup. Komunikasi politik sebagai layaknya darah, mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) proses sistem politik; dan hasil proses itu tersimpul dalam fungsi – fungsi *output*, dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi *feedback* sistem politik. Begitulah, komunikasi politik menjadikan sistem politik itu hidup dan dinamis. Demikian adalah arti penting fungsi komunikasi politik dalam praktik politik.

Praktik komunikasi politik dewasa ini, dalam era reformasi dan memasuki era digital, yaitu dengan makin massif nya jaringan internet sampai ke pelosok daerah di tanah air dan global, menjadikan praktik komunikasi politik makin luas dan substansinya bertambah lagi. Bila pada dua dekade yang lalu, praktik komunikasi politik masih mengandalkan pada media massa konvensional, dengan ukuran – ukuran yang terbatas dengan *segment public* yang tidak begitu luas, maka keadaan ini berubah dewasa ini, dengan makin luasnya jaringan internet, maka publik yang dijangkau juga seluruh nasional bahkan global.

Pertanyaan yang perlu diajukan, bagaimanakah konsep komunikasi politik pada era digital dewasa ini? Dan bagaimanakah praktiknya?

Tujuan penulisan artikel ini untuk memberi pemikiran-pemikiran baru terhadap perkembangan praktik dan konsep komunikasi politik yang telah memasuki era digital. Bagaimana fungsi dan proses komunikasi politik dalam era digital, sehingga untuk mencapai kepada publik yang lebih luas telah dimanfaatkan jaringan internet termasuk media sosial yang sudah dikenal dalam masyarakat luas. Sumber penulisan terhadap tema komunikasi politik dalam era digital berasal dari literatur tercetak dan media *online* dengan teknik analisis kualitatif – deskriptif. Diharapkan artikel ini dapat memberi wawasan yang lebih luas dan pemahaman yang baru terhadap perkembangan praktik komunikasi politik pada era digital.

Posisi tema artikel ini berada pada deskripsi mengenai pemahaman dan praktik komunikasi politik Indonesia di era digital. Praktik komunikasi politik Indonesia ketika memasuki era reformasi masih belum

banyak di ungkap dari perspektif kekinian, artinya dari pemahaman pemikiran era reformasi.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis kualitatif – deskriptif. Data dikumpulkan dari hasil studi pustaka yang terkait dengan masalah pokok. Deskriptif kualitatif memberikan penjelasan yang mendalam dan luas dari masalah pokok penulisan. Sehingga deskripsi yang mendalam dapat menjawab fenomena yang dirumuskan dalam masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Media baru dan dan Era Digital

Alvin Toffler (dalam Raharjo, 2011) menyebut era baru dewasa ini dengan *The Third Wave* atau gelombang ketiga, yang artinya menegaskan saat ini peradaban manusia telah memasuki era bahwa fungsi informasi menjadi jauh lebih penting daripada era sebelumnya. Pada era baru ini telah muncul media baru seperti internet. Rahardjo (2011) mengatakan bahwa keberadaan media baru tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Aktivitas jurnalisme dengan hadirnya internet telah memanfaatkan jaringan internet untuk mencari, mengolah dan mengirimkan informasi atau berita-berita sebagai produk jurnalisme. Orang menyebutnya dalam kegiatan jurnalisme melalui internet sebagai bentuk jurnalisme online atau dapat juga sebagai media digital. Artinya, produk jurnalisme kemudian disebarluaskan melalui jaringan internet ke pelosok dunia. Bahkan disebut pula bahwa kehadiran Internet telah menjadi sosok baru yaitu sebagai media baru (*new media*), menurut Martin Lister, dalam bukunya *New Media : a critical introduction* (London and New York, 2009), dengan beberapa karakteristik: bersifat digital, interaktif, hipertekstual, virtual, berjejaringan (*networked*) dan *simulate*.

Terdapat beberapa pengertian mengenai media baru salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Denis Mc Quail dalam bukunya *Teori Komunikasi Massa* (1987 : 16-17). Mc Quail menamakan media baru sebagai media telematik yang merupakan perangkat teknologi elektronik yang berbeda dengan penggunaan yang berbeda pula. Perangkat media elektronik baru ini mencakup beberapa sistem teknologi, sistem transmisi (melalui kabel atau satelit),

sistem miniaturisasi, sistem penyimpanan dan pencarian informasi. Dan juga sistem penyajian gambar (dengan menggunakan kombinasi teks dan grafik secara lentur, dan sistem pengendalian (oleh komputer).

Denis Mc Quail menjelaskan media telematik atau media baru tersebut memiliki beberapa ciri utama yaitu: (1) Proses komunikasi berbentuk desentralisasi, yaitu pengadaan dan pemilihan berita tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemasok komunikasi. (2) Sistem teknologi komunikasi mempunyai kemampuan tinggi, yang pengantaran melalui kabel dan satelit. Pengantaran tersebut mampu mengatasi hambatan komunikasi dikarenakan pemancar lainnya. (3) Komunikasi timbal balik (interaktivitas) yaitu penerima dapat memilih, menukar informasi, menjawab kembali, dan dihubungkan dengan penerima lainnya secara langsung. (4) Terdapat kelenturan bentuk, isi dan penggunaan.

Media baru berupa internet dengan jaringan global telah menyediakan platform yang dapat digunakan oleh setiap orang dalam rupa media sosial (social media). Media sosial telah dapat berinteraksi komunikasi menjadi sarat dengan kode – kode simbolik yang menghubungkan individu dengan individu lain secara virtual dan sekaligus memungkinkan terjadinya pertukaran pesan baik berupa teks maupun gambar. Akibatnya pesan yang ditampilkan menjadi lebih menarik sehingga dapat memberikan stimulus bagi orang lain untuk memberikan komentar. Interaksi antar individu yang terjadi di media social dapat dilakukan baik secara personal maupun impersonal, dan dapat berlangsung dalam waktu yang singkat namun terjadi dengan sejumlah besar orang sekaligus. Relasi personal atau impersonal dan sekaligus bersifat massa ini menjadi ciri penting dari interaksi yang dilakukan melalui media sosial. Tidak hanya itu, realitas virtual yang dikonstruksi melalui media sosial juga mampu direproduksi secara mekanis sehingga mengalami akselerasi dalam proses penyebarannya dengan kecepatan penyebaran yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan penyebaran pesan yang disampaikan melalui media konvensional seperti surat kabar, televisi dan radio. Selain itu pemaknaan terhadap tanda hasil rekayasa teknologi di media sosial juga berbeda dengan pemaknaan tanda yang ada pada dunia nyata. Media sosial yang dikenal dan

cukup digemari masyarakat adalah Facebook, twitter, Instagram, Youtube, Path, dan lainnya.

Dalam pengertian yang populer, karakteristik media baru (Romli,2012), dengan fokus pada media online mempunyai keunggulan dibandingkan media konvensional, antara lain: (1) media online bersifat multi media yaitu dapat memuat atau menyajikan berita/ informasi dalam bentuk teks, audio,video, grafis dan gambar secara bersamaan; (2) Aktualitas, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajiannya; (3) Cepat, begitu di posting atau diupload, langsung seketika dapat diakses semua orang; (4) *Update*, proses pembaruan (updating) informasi dapat dilakukan dengan cepat, baik dari sisi konten maupun redaksional, misalnya kesalahan ketik atau ejaan, dan belum menemukan istilah "ralat" di media online sebagaimana sering muncul di media cetak. Informasi pun disampaikan secara terus menerus.; (5) Kapasitas luas, di mana halaman web bisa menampung naskah sangat panjang; (6) Fleksibilitas, pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja, juga jadwal terbit (*update*) bisa kapan saja,setiap saat; (7) Luas, menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. (8) Bersifat interaktif,dengan adanya fasilitas kolom komentar dan *chat room*; (9) Terdokumentasi, informasi tersimpan di "bank data" (arsip) dan dapat ditemukan melalui "link", "artikel terkait", dan fasilitas "cari " (*search*); (10) *Hyperlinked* ,terhubung dengan sumber lain(*links*) yang berkaitan dengan informasi tersaji.

Dari pengertian media baru yang tersambung melalui jaringan internet global, maka produk sistem elektronik dalam telematika, tidak lain menggunakan digital. Dewasa ini melalui jaringan internet, maka masyarakat telah memasuki era digital yang memudahkan kehidupan masyarakat dan membantu sehari-hari untuk berbagai keperluan. Dalam bidang komunikasi politik sekarang ini telah memanfaatkan internet dengan media baru dan media sosial ,diantaranya untuk sosialisasi politik dan kampanye.

### **Arti Komunikasi Politik dan Nilai demokrasi**

Lord Windlesham mengartikan komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan berperilaku tertentu (Effendy,1992:158).

Sementara itu, Graig Allen Smith (Nasution,1990:vii) mengartikan komunikasi politik

adalah proses menegosiasikan orientasi komunitas melalui interpretasi dan pengklasifikasian kepentingan – kepentingan dari hubungan – hubungan kekuasaan dan peranan – peranan komunitas di dunia. Masalah – masalah dapat terselesaikan melalui politik dan politik terselesaikan melalui komunikasi.

Fagen mengartikan komunikasi politik sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Cakupannya meliputi studi mengenai jaringan komunikasi (organisasi kelompok, media massa dan saluran-saluran khusus) dan determinan sosial ekonomi dari pola-pola komunikasi yang ada pada sistem yang dimaksud.

Dan Nimmo (1989:10) memberi batasan komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensi aktual maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik.

Lucyan W.Pye memberi definisi komunikasi politik sebagai proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya (dalam Surbakti,1992:119) Di sini partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Fungsi-fungsi ini dijalankan partai-partai politik dalam sistem politik demokrasi.

Prof. Miriam Budiardjo (1982) memberikan definisi komunikasi politik yang merupakan salah satu fungsi partai politik yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa- "penggabungan kepentingan" (*interest agregation*) dan "perumusan kepentingan " (*interest articulation*), untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politik.

Maswadi Rauf, ahli ilmu politik dari Universitas Indonesia, berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan bagian objek dari kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik

(<https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-politik>.  
Diakses pada tanggal 09/12/2019).

Untuk menggerakkan proses komunikasi politik dalam suatu negara demokrasi maka peranan dan fungsi-fungsi partai politik menjadi penting dan strategis. Keberadaan partai politik dalam suatu sistem politik yang demokratis mempunyai peranan penting. Sistem politik yang ingin ditegakkan bukan saja secara institusi kelembagaan tetapi juga yang lebih bermakna terhadap pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat dan negara.

Dalam mewujudkan suatu negara dan masyarakat demokrasi, perlu ada sejumlah nilai-nilai yang menuntun dan memberi pedoman bagi pelaksanaan ke arah cita-cita demokrasi. Ada sejumlah nilai-nilai yang mempunyai makna dalam kehidupan sosial politik masyarakat. Prof. Miriam Budiardjo, MA (2000:63) Guru besar ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, menyebutkan sejumlah nilai-nilai yang hakiki terhadap kehidupan demokrasi, yaitu :

- (1) nilai menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
- (2) nilai menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
- (3) menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
- (4) membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
- (5) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*pluralisme*);
- (6) menjamin tegaknya keadilan.

Sejumlah nilai demokrasi tersebut akan dapat dihayati dan menjadi orientasi dalam sikap dan perilaku masyarakat dan partai politik, bila sosialisasi nilai-nilai demokrasi telah disadari dengan baik. Di sini partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi politik. Diasumsikan partai politik mampu berperan sebagai *agen* sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Ada beberapa fenomena yang menjadi hambatan dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi, yang tampaknya sulit diatasi, kalau tidak dikatakan sudah *kronis*.

*Pertama*, nilai-nilai demokrasi secara universal, diantaranya yang penting adalah keberadaan pluralisme politik dan sosial, bahkan budaya serta berperannya partai politik untuk menanamkan nilai-

nilai demokrasi, diantaranya, sosialisasi politik yang dapat juga masuk dalam kegiatan komunikasi politik dengan sasaran publik secara luas, hingga memberi pemahaman terhadap penyelenggaraan pemilihan umum untuk memunculkan pemimpin nasional maupun daerah melalui pilkada secara demokratis. Dalam realitas sosialnya, masih banyak partai politik yang belum sepenuhnya mengakui *pluralisme* ini.

*Kedua*, partai politik dalam sistem politik demokrasi seperti di Indonesia masih dipahami sebagai fenomena yang belum merakyat. Masih banyak partai yang menjalin komunikasi politik dan hadir menjelang pemilu legislatif dan pilpres saja. Padahal partai politik sebagai suatu institusi politik dalam tataran infrastruktur politik yang secara langsung mengakses kepada rakyat. Dalam dialektika politiknya, partai politik bersaing untuk memperoleh kekuasaan secara sah yang lazimnya melalui mekanisme pemilihan umum. Menurut Kaare Strom (dalam Pawito, 2001) bahwa dalam praktik politik yang sehat dan fair, maka sebenarnya demokrasi adalah kompetensi yang *fair* diantara partai politik yang ada. Sangat sulit dibayangkan bila demokrasi dapat berkembang secara wajar di dalam sistem partai tunggal sebagaimana tipikal dijumpai di Negara-negara komunis seperti Soviet Russia maupun Eropa Timur sampai akhir decade 1980-an.

*Ketiga*, gerak partai oposisi masih dibatasi, padahal untuk memperoleh kemajuan-kemajuan dalam demokrasi, hal ini sangat penting. Praktik penguasa yang *hegemonic* (dan *otoriter*) selama rezim Orde Baru tidak memberi peluang berperannya partai oposisi hingga kejatuhan rezim itu pada bulan Mei 1998. Terdapat fenomena multi partai secara formal, melalui UU Partai Politik tetapi secara *defacto* tidak ada kesetaraan dalam pemberian hak untuk berkembang sehingga yang terjadi adalah dominasi oleh partai yang berkuasa yaitu Golongan Karya (Golkar). Dua partai lainnya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan kata lain, demokrasi sebenarnya mengimplikasikan sistem multi partai secara adil melalui proses dinamika politik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan (*power*).

Institusi partai politik menjadi sarana bagi proses komunikasi politik. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat agar dapat tercapai sasaran komunikasi politik, diantaranya merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan partai politik. Artinya

ketokohan seorang politisi dan kemantapan lembaga politiknya (partai politik) dalam masyarakat akan mempunyai pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi politik. Selain itu juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode dan memilih media politik yang tepat. Bila dahulu 20 tahun yang lalu, masih mengandalkan pada media konvensional seperti radio, televisi maupun surat kabar, namun dewasa ini, dalam era reformasi yang telah memasuki era digital telah menggunakan media online maupun media sosial untuk melancarkan komunikasi politik.

Pada hakikatnya, suatu strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Dengan demikian, merawat ketokohan (pemimpin politik partai atau politisi) dan memantapkan kelembagaan politiknya (partai politik) akan merupakan keputusan yang paling tepat bagi komunikasi politik untuk mencapai tujuan politik ke depan.

### **Praktik Komunikasi Politik Masa Orde Baru**

Masa pemerintahan Orde Baru dengan tokoh sentralnya Presiden Soeharto dalam praktik komunikasi politik telah dibangun dengan strategi yang cukup kokoh. Konsep komunikasi politik menggunakan pendekatan interaksi simbolik, khususnya salah satu *genre*-nya yaitu pendekatan *dramaturgis* Erving Goffman (dalam Deddy Mulyana, 2004:2). Dengan pendekatan itu mencoba “*merekonstruksi*” konsep diri Soeharto saat berkuasa dan ketegangan dengan konsep dirinya yang lama. Konsep diri Soeharto sebagai presiden telah dibangun puluhan tahun, dikonfirmasi kabinet-kabinetnya, Tentara Nasional Indonesia (dulu ABRI), MPR dan lembaga-lembaga Negara lainnya, media massa, termasuk buku-buku yang menyanjung semisal buku *Manajemen Presiden Soeharto*, dan seluruh rakyatnya. Untuk memperkuat peran sosialnya Soeharto menggunakan *mistifikasi*. Berbagai upacara resmi, *formalitas* dan gelar yang *impresif* (misalnya “Bapak Pembangunan”) digunakan untuk menciptakan kharismanya, diantaranya dengan menjaga jarak sosial dengan rakyat. Acara “*Laporan Khusus*” yang disiarkan TVRI seakan-akan menjadikan sikap Soeharto sebagai sosok yang sedikit rendah hati boleh jadi membuat khalayak terkesima

untuk melihat sang presiden dari dekat. Namun dengan gerakan *Reformasi* tahun 1998 terjadi penghancuran sikap-sikap Soeharto. Rakyat mulai sadar bahwa semuanya hanya kepalsuan. Keadaan kini sudah jauh berubah. Konsep diri Soeharto sebagai orang nomor satu di Indonesia tidak lagi disangga oleh mayoritas bangsanya, komunikasi politik yang dibangun telah hancur.

### **Akar Komunikasi Politik Indonesia**

Membahas kajian komunikasi politik, sebagai bagian dari ilmu sosial, tetap terikat oleh faktor sejarah dan kebudayaan. Artinya, komunikasi politik tidak bebas nilai. Sejak tahun 1950-an, telah terjadi pergeseran perhatian pakar ilmu sosial dan ilmu politik terhadap Indonesia. Para pakar Barat, selalu diliputi kekecewaan terhadap perkembangan komunikasi politik yang terjadi di Negara baru merdeka selalu diluar dugaan dan harapan mereka. Misalnya, asumsi demokrasi tidak lebih dari kebiasaan sempit (*parochial*) pakar ilmu sosial barat saja. Artinya, *universalisme* dari proses demokrasi ternyata tidak berlaku, sebab ciri-ciri lokal (faktor sejarah dan budaya) tidak dapat diabaikan begitu saja. Bahkan semakin disadari faktor sejarah dan budaya akan banyak membentuk jati diri komunikasi politik. Kajian mengenai kebudayaan (*culture*) dalam komunikasi politik makin berkembang, dengan fokus pada kebudayaan politik.

Pancasila sebagai ideologi Negara merupakan landasan pemikiran dari komunikasi politik Indonesia. Sesungguhnya pancasila dilatarbelakangi oleh filsafat sosial Indonesia (*kolektivisme* dan filsafat ekonomi *sosialisme*). Hal ini merupakan ciri umum dari masyarakat timur yang membedakannya dari masyarakat barat.

Bagaimana komunikasi politik berperan untuk membentuk wujud demokrasi di Indonesia? Para pendiri Republik Indonesia sangat tertarik pada demokrasi yang menilai bahwa dalam pancasila, demokrasi dirakit menjadi satu dengan *kolektivisme* dan keadilan sosial. Dalam hal ini, filsafat politik demokrasi dibangun di atas filsafat sosial *kolektivisme* dan filsafat ekonomi *sosialisme* (kedaulatan rakyat) yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

Konsep kedaulatan rakyat adalah khas Indonesia (temuan para *local genius*), yang mampu memadukan nilai-nilai timur dengan nilai-nilai barat,

dengan kata lain, nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru. Menurut Anwar Arifin( 2003) dalam keseluruhan naskah UUD 1945 (asli) sama sekali tidak terdapat kata demokrasi. Justru yang ada ,kata “*kerakyatan*” dan kata “*kedaulatan rakyat*”. Dari konsep kerakyatan dan kedaulatan rakyat itu tercermin atau mempunyai makna “*demokrasi*”. Dalam proses komunikasi politik harus digerakkan oleh supra-struktur politik dan infra-struktur politik secara timbal balik menuju pada kehidupan demokrasi.

### **Praktik Komunikasi Politik pada Era Digital**

Proses komunikasi politik dewasa ini telah mengalami perubahan yang mendasar. Dalam era globalisasi dengan hadirnya internet telah memungkinkan masyarakat dunia untuk mengakses dan menggunakan jaringan internet untuk keperluan komunikasi politik yang lebih massif. Faktor dominan yang motor perkembangan dan perubahan sosial yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Marshall McLuhan melukiskan kondisi dunia sebagai *the global village* (desa global). Media elektronika baru seperti internet telah mengubah cara berpikir,berperasaan dan bertindak manusia. Manusia dan masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia, berada ditengah-tengah revolusi/perubahan sosial yang belum pernah dipahami sama sekali.

Proses komunikasi politik pada era Reformasi dewasa ini telah jauh berbeda dengan praktik komunikasi politik sebelum kehadiran Internet dahulu. Teknologi internet ditemukan menjelang abad ke-21 menjelang jatuhnya pemerintahan komunis Uni-Soviet, serta mulai dikenalnya paham demokrasi di Eropa Timur ,termasuk Rusia dan kawasan Asia. Internet masuk dan mulai dikenal di Tanah Air sekitar 1998,bahkan ketika kejatuhan rezim orde baru juga dipengaruhi peran internet ,meskipun masih terbatas,tetapi mampu menggalang rakyat untuk menggerakkan Reformasi, suatu gerakan perubahan nasional.

Menurut Hafied Cangara (2009:392) ,para teknolog idealis yang mengembangkan internet yakin bahwa kehadiran media baru berupa internet dengan cepat akan menyebarluaskan nilai-nilai baru untuk memperkuat demokrasi ke seluruh dunia,terutama dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan.

Internet merupakan singkatan dari *international networking* atau *inter -connection*

*networking*, yang berarti sebuah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia sehingga setiap komputer yang terkoneksi di dalamnya dapat berkomunikasi atau bertukar data tanpa dibatasi oleh jarak, waktu,dan tempat. Internet juga dapat dianalogikan seperti jaringan laba-laba (*the web*) yang menyelimuti bola dunia yang berdiri dari *node* (titik-titik) yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya.

Sejumlah kelebihan yang dimiliki media internet,antara lain: (1) menembus batas wilayah,ruang,dan waktu;(2) memperluas akses memperoleh informasi global;(3) meningkatkan kemampuan untuk berserikat secara bebas;(4) mengancam tatanan yang telah mapan, seperti pemerintahan otokrasi; (5) memiliki kecepatan perkembangan dan penyebaran yang sulit diatasi. Dengan demikian,proses komunikasi politik melalui media internet tentunya akan sangat kuat menyebarkan informasinya ke pelosok dunia, tanpa halangan yang berarti.

Pemilu legislatif tahun 2009 merupakan pemilu yang paling ramai dengan kampanye lewat media internet. Untuk pertama kalinya, beberapa kandidat legislatif memiliki media sendiri yang dikelola secara virtual. Para caleg memiliki blog yang dibuat sendiri dan tim suksesnya. Isinya beragam, ada yang menampilkan profil dirinya saja dan juga dilengkapi dengan program-program dan janji-janji politik.

Pengelompokan media yang dikenal dalam masyarakat,antara lain: (1) media publikasi/blog yaitu *blogspot*, *blogger* dan *Wordpress*; (2) *Microblog* seperti *Twitter* dan *Plurk*; (3) Media berbagi (media *sharing*) seperti *Filckr*, *Youtube* dan *Slideshare*; (4) Media jejaring sosial seperti *Facebook*, *Myspace*; (5) Media kolaborasi seperti wikipedia, wikileaks;(6) Forum diskusi seperti Kaskus; (7) Media percakapan seperti *Google Talk*, Yahoo Messenger, Skype; (8) Situs ulasan seperti Goodread dan Yelp.

Dalam praktik komunikasi politik, walaupun belum begitu massif memaksimalkan media sosial seperti Facebook,Twitter dan YouTube, penggunaan media online untuk berkampanye sudah dimulai. Kecenderungan pola penggunaan media baru ini berbarengan dengan kesadaran pihak kandidat akan efektivitas pengaruh media online, dan kecenderungan masyarakat yang semakin tinggi dalam mengakses internet.

Kekuatan media sosial untuk mempengaruhi masyarakat didasarkan secara eksklusif pada aspek sosialnya, ini berarti interaksi dan partisipasi yang dapat dilakukan melalui kampanye sebagai bagian dari proses komunikasi politik dengan khalayak. Kampanye merupakan penyampaian pesan dari pengirim kepada khalayak. Layanan jaringan sosial yang khas dapat berbagi konten, komunitas web, dan forum internet media sosial. Sejauh penggunaan media sosial melalui platform Facebook, Twitter dan Youtube maka kandidat politik akan terus berinteraksi dengan pendukung dan menerima dukungan dalam bentuk sumbangan dan relawan.

Media mainstream yang sudah ada yaitu media cetak surat kabar, tabloid, dan majalah serta media elektronik seperti televisi dan radio, maka internet yang hadir ditengah komunitas sosial masyarakat dunia memberi pengaruh secara langsung dalam berbagai aktivitas politik (Yodiansyah, 2017). Tidak terhindarkan, proses komunikasi politik kini tidak dapat mengabaikan internet sebagai saluran paling efektif karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki media konvensional sebelumnya.

## KESIMPULAN

Proses komunikasi politik dewasa ini dengan kehadiran internet, telah meninggalkan cara-cara atau metode komunikasi politik yang konvensional. Namun demikian substansi berupa pesan-pesan politik maupun komunikator atau aktor dalam komunikasi politik masih menjadi faktor-faktor penting untuk dipakai seperti dalam konsep komunikasi terdahulu. Dengan demikian, konsep komunikasi politiknya masih sama, hanya saja media komunikasi yang dipakai dewasa ini telah menggunakan internet, yaitu berupa media online maupun media sosial.

Praktik komunikasi politik pada masa orde baru dapat memberi pelajaran berharga, bagaimana suatu rezim berkuasa akan senantiasa menjaga keberlangsungan kekuasaannya dengan cara-cara "pencitraan" seakan-akan dekat dengan rakyat.

Perubahan yang terjadi dalam praktik komunikasi politik dewasa ini dengan menggunakan media internet, tentunya membawa beberapa kelebihan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pesan-pesan politik dapat disebarluaskan hingga tidak terbatas, demikian pula jangkauan khalayaknya juga semakin luas. Namun kekurangannya, bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses internet, maka pesan-

pesan politik tidak akan sampai. Dalam realitas sosialnya, pemanfaatan internet telah memberi keuntungan yang makin baik untuk proses komunikasi politik dalam mencapai tujuan pembentukan masyarakat yang demokratis dan transparan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan naskah ini. Dan kepada redaksi jurnal Diakom yang memberikan pemuatan terhadap naskah ini. Ssemoga bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. Komunikasi Politik – Pengertian – Fungsi – Tujuan. Tersedia di <https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-politik>. Diakses pada tanggal 09/12/2019 pukul 12.30 WIB
- Alfian (1993). *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arifin, Anwar (2003) *Komunikasi Politik – Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Budiardjo, Miriam (1982) *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Cangara, Hafied (2009) *Komunikasi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Effendy, Onong U (1992) *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kantaprawira, Rusadi (1977) *Sistem Politik Indonesia-Suatu Model Pengantar*. Bandung: Tribisana Karya.
- Lister, Martin (2009) *New Media: a critical introduction*. London and New York.
- McQuail, Denis (2011) *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi 6 Buku 2. Terjemahan Putri Iva Izzati. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mulyana, Deddy (2004) *Komunikasi Populer-Kajian Komunikasi dan Budaya Kontemporer*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

- Nasution, Zulkarimein (1990) *Komunikasi Politik-Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nimmo, Dan (1989) *Komunikasi Politik-Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Remaja Karya.
- Pawito (2001) "Media Massa dan Pengembangan Demokrasi di Indonesia-Disekitar Periode Pemilu 1999". *Jurnal Penelitian Pers dan Pendapat Umum*, Vol.5, Nomor 1, 2001. BPPI Jakarta. 84-107.
- Rahardjo, Turnomo (2011) "Isu-isu Teoritis Media Sosial", dalam FajarJunaedi (ed). *Komunikasi 2.0 Teoritis dan Implikasi*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Romli, Asep Syamsul (2012) *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Surbakti, Ramlan (1992) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yodiansyah, Hefri (2017) *Komunikasi Politik Media Surat Kabar Dalam Studi Pesan Realitas Politik Pada Media Cetak Riau Pos dan Tribun Pekanbaru*. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 5, No. 1, Juni 2017 Hlm 11 – 30.